



Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Lama Jabatan dan Rasio Pembiayaan Utang terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui Website

Wijita Lutvitasari¹, Lintang Venusita²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: wijita.21036@mhs.unesa.ac.id¹, lintangvenusita@unesa.ac.id²

Abstract. *This study was conducted to determine whether there is an influence of the quality of financial reports, length of office and debt financing ratio on local government transparency through the website. The sampling technique used purposive sampling consisting of all local governments in Indonesia in 2023 with a sample size of 513 local governments. Based on the statistical tests that have been carried out, the results of this study indicate that the quality of financial reports and the size of the local government have an effect on local government transparency through the website. While the length of office does not affect local government transparency through the website.*

Keywords: *quality of financial reports; length of tenure; debt financing ratio; transparency; website*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2023 dengan jumlah sampel 513 pemerintah daerah. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan kualitas laporan keuangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website. Sedangkan lama jabatan tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan; lama jabatan; rasio pembiayaan utang; transparansi; website

1. LATAR BELAKANG

Transparansi merupakan isu yang telah menjadi perhatian serius dalam pemerintahan yang demokratis. Adanya transparansi menjadi suatu cara bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan faktual (Novalia & Deviani, 2023). Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberi kepercayaan dalam pengelolaan anggaran daerah oleh masyarakat. Kemudahan dalam mengakses informasi tentang pemerintah daerah dianggap penting untuk menjamin partisipasi demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah daerah, mencegah korupsi, pengambilan keputusan, keakuratan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, perusahaan dan jurnalis. Hingga saat ini Indonesia terus mengalami tantangan yang serius dalam melawan tindak korupsi. Hal ini didukung berdasarkan hasil dari *Corruption Persception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana pada tahun 2019 Indonesia memperoleh skor 40 yang merupakan skor tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia namun pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 skor IPK yaitu 34 (Transparency International Indonesia, 2023). Ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Salah satu faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan korupsi ini yaitu rendahnya

pelaksanaan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Pradita, 2019). Oleh karena itu dengan adanya transparansi ini menjadi salah satu cara dalam mencegah adanya tindak korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat (Yuliani, 2017). Informasi laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi kriteria yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Taufik & Bandi, 2015). Saat ini di Indonesia, hampir seluruh Pemerintah Daerah telah memiliki situs web daerah masing-masing (Yuliani, 2017). Berdasarkan UU KIP Pasal 9 Ayat (4), informasi keuangan wajib disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dipublikasikan melalui media agar mudah diakses oleh masyarakat luas (Yuliani, 2017). Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan website sebagai media untuk mempublikasikan laporan keuangan daerah masing-masing. Namun, masih ada beberapa pemda hingga saat ini yang belum memanfaatkan website tersebut secara maksimal. Sehingga, dilakukannya evaluasi transparansi pada pemerintah daerah oleh Komisi Informasi karena hal ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa UU KIP ini telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2023 terkait keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, yang dikategorikan informatif hanya ada 15 pemerintah pusat, untuk kategori menuju informatif ada 6 pemerintah provinsi, kategori cukup informatif ada 5 pemerintah provinsi, kategori kurang informatif ada 6 pemerintah provinsi dan untuk kategori yang tidak informatif ada 2 pemerintah provinsi.

Kualitas laporan keuangan berhubungan dengan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK merupakan Lembaga yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan audit. Pada tahun 2015, Standar Akuntansi Keuangan berbasis akrual telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan standar ini bertujuan agar kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Namun, berdasarkan BPK RI (2021), sejak standar akuntansi berbasis akrual diterapkan pada tahun 2016 dan hingga saat ini masih terdapat beberapa pemerintah daerah masih ada yang belum memperoleh opini WTP. Kualitas laporan keuangan yang rendah ini memicu rasa curiga dari masyarakat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Selain itu, laporan keuangan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan informasi yang disajikan tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan karena hal ini dapat memberikan keputusan yang buruk dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pemda diharapkan dapat melaksanakan

pengelolaan keuangan dengan baik dan mencapai transparansi (Nosihana & Yaya, 2016). Berdasarkan Adiputra et al., (2018); Nor et al., (2019); dan Nurhadianto & Sugiri, (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Novananda et al., (2021); Yustikasari, (2018); dan Ningsih, (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Kepala daerah merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu daerah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola pemerintah daerah. Masa jabatan mengacu pada lama waktu yang dihabiskan seseorang untuk memegang posisi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Masa jabatan kepala daerah yang semakin lama maka pengalaman dan informasi yang didapat terkait sumber daya daerah juga semakin besar (Fadilah & Venusita, 2024). Kepala daerah yang memegang jabatan lama akan lebih memahami bagaimana sistem kerja pemerintah daerah, sehingga dapat menemui celah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa mengurangi kinerjanya. Kepala daerah dalam mengambil keputusan cenderung memikirkan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Berdasarkan penelitian Pranaswati & Kiswanto, (2020), (2020) dan Gabriel & Castillo, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan lama jabatan kepala daerah tidak memengaruhi tingkat transparansi Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Tavares & da Cruz, (2017) lama jabatan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

Rasio pembiayaan utang memiliki peran dalam mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Rasio pembiayaan utang yaitu kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan dalam menyediakan pelayanan dan program bagi masyarakat (Ningsih, 2018). Semakin tinggi rasio pembiayaan utang maka pengawasan yang dilakukan kreditur juga akan semakin besar terhadap penggunaan dana pinjaman tersebut serta kemampuan pemerintah untuk melunasi utang tersebut di masa depan (Medina, 2012). Ketika pemerintah memanfaatkan dana dari pinjaman kreditur tersebut, ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk terbuka mempublikasikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pada kreditur, sehingga kreditur dapat mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan utang tersebut (Nosihana & Yaya, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Christina, (2016) dan Trisnawati & Achmad, (2013) menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap transparansi. Sedangkan Pranstawi & Kiswanto, (2020); Nosihana & Yaya, (2016) dan Wilopo, (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang tidak mempengaruhi adanya transparansi

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian di atas dan fenomena yang terjadi mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Lama Jabatan dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling, (1976), teori agensi yaitu hubungan yang muncul atas dasar perjanjian yang antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dan agen sebagai penerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan sesuai kepentingan principal. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan adanya *agency problem* yang berupa asimetri informasi. Berdasarkan teori agensi terjadinya asimetri informasi dikarenakan pemerintah memiliki informasi sumber daya daerah lebih banyak daripada masyarakat (Cinintya et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, hubungan principal dan agen harus menggunakan informasi yang efisien agar dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi (Novananda et al., 2021).

Pemerintah daerah memiliki informasi lebih lengkap terkait sumber daya daerah dibanding masyarakat. Jika asimetri informasi ini terlalu besar maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sehingga dengan menyampaikan informasi yang jujur dapat meminimalkan terjadinya *agency problem*. Begitu pula dengan masa jabatan kepala daerah yang panjang memberikan peluang kepala daerah menyalahgunakan wewenang karena kepala daerah memiliki informasi banyak terkait pemerintah daerah. Adanya transparansi dapat meminimalisir terjadinya permasalahan karena masyarakat dapat mengawasi pemerintah daerah melalui laporan yang dipublikasi. Berdasarkan teori agensi, pemerintah bertanggungjawab dan transparan dalam pengelolaan dana pinjaman kepada kreditur dan masyarakat. Ketika rasio pembiayaan utang semakin besar maka tanggungjawab pemda dalam mempublikasikan laporan keuangan semakin besar. Hal ini agar masyarakat dan kreditur dapat mengetahui dan mengawasi sejauh mana pemda memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali ditemukan oleh Spence Michael, (1973) yang menyatakan bahwa pemilik informasi (agen) memberikan sinyal kepada penerima (principal) berupa laporan keuangan. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah yang mendapat wewenang dari masyarakat berusaha menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Menurut Yustikasari, (2018)

sinyal yang disampaikan pemerintah yaitu informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas, sistem pengendalian internal yang meningkat, keterbukaan informasi yang lengkap dan informasi yang detail di website (A. D. Astuti, 2020). *Signalling theory* berfungsi mengurangi asimetri informasi.

Menurut *signalling theory*, di dalam penelitian ini, sinyal informasi yang diberikan agen kepada principal yaitu berupa laporan keuangan (Yustikasari, 2018). Pemerintah daerah yang telah melaksanakan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan mendapatkan opini terbaik yaitu WTP, maka ini dapat dijadikan sinyal yang baik untuk masyarakat. Dengan diterimanya opini terbaik dari BPK ini, pemerintah dapat membuktikan bahwa pemda telah melakukan kinerja dengan baik dalam pengelolaan laporan keuangan. Pemerintah daerah perlu menjaga kepercayaan para kreditur dalam pengelolaan dana pinjaman. Rasio pembiayaan utang yang semakin tinggi maka mendorong pemda untuk melaksanakan transparansi. Dengan dilakukannya transparansi laporan keuangan ini menjadi sinyal positif dari pemda kepada publik.

Transparansi

Definisi transparansi menurut Mardiasmo, (2006) yaitu keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan terkait dengan kinerja pemerintah yang diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Firmansyah et al., 2022). Transparansi merupakan konsep yang berhubungan dengan tersedianya informasi yang dapat dijangkau dan dipergunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (Araujo & Tejedro-Romero, 2016). Transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terbuka dan jujur serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan melalui laporan keuangan yang disajikan di situs web pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2004 yang sekarang sudah dirubah menjadi PP71/2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi keuangan menyatakan bahwa, transparansi yaitu penyampaian informasi keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur terkait informasi pengelolaan sumber daya daerah (Fajarudin, 2021). Aturan ini diterbitkan agar masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi keuangan dan dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menegaskan terkait pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik (Ningsih, 2018). Keterbukaan informasi publik ini harus dilaporkan secara berkala kepada publik. Informasi publik ini meliputi laporan keuangan, data kinerja, dan program badan publik.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari tanggung jawab para penyusun laporan keuangan. Menurut Shahan, (2008), tujuan utama pelaporan keuangan yaitu menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Andriyani, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, kinerja, dan informasi lainnya yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. GFOA's Certificate of Achievement Program adalah alat dalam pengukuran kualitas laporan keuangan dan pengungkapan pada sektor pemerintah. Ini diberikan oleh BPK yang dikenal sebagai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Indonesia (Wilopo, 2017). Kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik akan membuat publik mempercayai pemerintah, sehingga pemerintah daerah yang mendapat hasil WTP dari BPK cenderung akan melaporkan laporan keuangan daerahnya. Laporan keuangan daerah yang lengkap dan konsisten dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Nosihana & Yaya, 2016).

Lama Jabatan

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Kepala daerah dengan masa jabatan yang lama akan memiliki pemahaman sistem kerja yang mendalam, sehingga dapat mengetahui celah pada sistem kerja di dalamnya dan dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa mengurangi kinerjanya.

Rasio Pembiayaan Utang

Rasio pembiayaan utang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menjamin sumber daya yang diperoleh dalam menyediakan layanan dan program untuk masyarakat (Ningsih, 2018). Rasio pembiayaan utang ini memperlihatkan hubungan antara pemerintah dengan kreditur, dimana semakin meningkat rasio pembiayaan utang maka pengawasan kreditur semakin ketat dalam mengawasi penggunaan dana yang dipinjamkan dan kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya di masa mendatang (Nosihana & Yaya, 2016). Semakin tinggi rasio pembiayaan utang, semakin besar pula dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangannya melalui websitenya masing-masing.

Pengembangan Hipotesis

Kualitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Laporan keuangan yang berkualitas baik adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan yang wajar. Pemerintah daerah yang transparan akan laporan keuangannya kepada masyarakat berarti menunjukkan hasil laporan keuangan yang telah dikelolanya sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Nosihana & Yaya, 2016). Salah satu hal yang mendorong atau memotivasi pemerintah dalam transparansi laporan keuangan di internet yaitu adanya penghargaan yang diberikan dari pihak eksternal yaitu pemberian opini oleh BPK. Laporan keuangan yang berkualitas baik dapat membuktikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya sesuai dengan SAP. Selain itu, juga menunjukkan bahwa pemerintah tersebut memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Afriani & Satyawan, 2023). Laporan yang berkualitas yang telah dipublikasikan ini sebagai bentuk sinyal dari pemda kepada masyarakat. Hasil penelitian Yudistira, Abdul Rohman (2022); Krah & Mertens, (2020) dan Adiputra et al., (2018), menemukan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit memengaruhi terjadinya transparansi Pemerintah Daerah.

H₁: Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap transparansi Pemerintah Daerah melalui website

Lama Jabatan terhadap Transparansi

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 kepala daerah memiliki masa jabatan selama 5 tahun (Pranaswati & Kiswanto, 2020). Kepala daerah dapat menjabat paling lama dua periode atau sepuluh tahun. Di Indonesia, kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dengan strata tertinggi di tata pemerintahan daerah. Kepala daerah yang sudah lama menjabat dianggap mendapat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi. Kepala daerah akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah dari masyarakat yaitu mengelola daerah dengan baik dan melaporkan segala pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Tavares & da Cruz (2017) menemukan adanya pengaruh antara lama jabatan kepala daerah dengan transparansi pemerintah daerah yang dilakukannya.

H₂: Lama Jabatan Berpengaruh terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui website

Rasio Pembiayaan Utang terhadap Transparansi

Rasio pembiayaan utang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban lancarnya. Pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan informasi terkait laporan pengelolaan dana pinjaman kepada kreditur. Hal ini bertujuan agar kreditur dapat mengawasi penggunaan dana pinjaman dan menilai kemampuan daerah dalam melunasi

kewajibannya. Semakin besar rasio pembiayaan utang maka semakin baik pengungkapan informasi keuangan. Pelaksanaan transparansi melalui website dapat mempermudah kreditur dalam mengawasi kinerja pemerintah (Wilopo, 2017). Penelitian yang dilakukan Christina, (2016) dan Trisnawati & Achmad, (2013) menemukan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap transparansi melalui website.

H₃: Rasio Pembiayaan Utang berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data transparansi yang diperoleh dari website pemda masing-masing, laporan neraca yang di dikeluarkan oleh DJPK, data masa jabatan yang dipublikasi oleh kemendagri dan data Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) semester 1 2024 yang disajikan oleh BPK.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah di Indonesia baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2023 yaitu sebanyak 546 pemerintah daerah. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. Berikut ini adalah kriteria untuk menentukan sampel dalam penelitian:

Tabel 1. Kriteria Sampel

Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2023	546
Dikurangi:	
Website pemerintah daerah yang tidak bisa diakses	(29)
Tidak tersedianya data berupa neraca pada laporan keuangan yang dipublikasikan DJPK Kementrian Keuangan periode 2023	(0)
error	(4)
Jumlah sampel	513

Berdasarkan sampel di atas, diperoleh sampel 513 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2023 yang memenuhi kriteria.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Transparansi

Transparansi pemerintahan daerah diartikan sebagai keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah daerah kepada publik, termasuk dalam pengungkapan data keuangan dan non keuangan. Hal ini ditentukan oleh tingkat aksesibilitas situs web pemerintahan daerah. Pengukuran transparansi ini menggunakan indikator dan metode scoring yang dikembangkan

oleh (García & García-García, 2010) yang telah disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Pengukuran pengungkapan transparansi dengan indeks *scoring* dengan bobot nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1.

Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian Laporan keuangan yang berkualitas merupakan penilaian atas penyusunan dan pelaporan LKPD berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPK RI yang diuraikan di hasil opini audit pemerintah daerah. Opini audit itu sendiri merupakan indikator dalam akuntabilitas yang terlihat dalam penyampaian laporan keuangan daerah. Sebagaimana dalam penelitian Trisnawati & Achmad (2014), untuk mengukur kualitas laporan keuangan berdasarkan penilaian opini audit digunakan skala *dummy* dalam pengukuran variabel ini yaitu skor 1 untuk WTP dan 0 untuk Non WTP

Lama Jabatan

Lama jabatan kepala daerah yaitu lama tahun menjabat kepala daerah dalam masa pemerintahannya. Seperti dalam penelitian Tavares & da Cruz, (2017), Lama jabatan kepala daerah diukur dengan jumlah lama tahun menjabat kepala daerah terpilih

Rasio Pembiayaan Utang

Rasio pembiayaan utang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana pinjaman (utang) untuk membiayai aset (Sinaga dan Prabowo, 2011). Dalam penelitian Laswad, dkk, (2005) mengungkapkan bahwa apabila rasio pembiayaan utang tersedia dan dapat diakses pada website maka menunjukkan bahwa pemda transparan. Menurut Medina, (2012), rasio pembiayaan utang diukur dengan: $\text{rasio pembiayaan utang} = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{total aset}}$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dibutuhkan yaitu laporan neraca yang dikeluarkan DJPK Kementerian Keuangan tahun 2023, data masa jabatan kepala daerah yang dipublikasi kemendagri dan opini atas LKPD dari IHPS semester 1 di website BPK RI.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai teknik analisis data. Untuk keseluruhan Teknik analisis menggunakan software SPSS 2025, yang meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R²))

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan fenomena data yang dapat dilihat dari nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

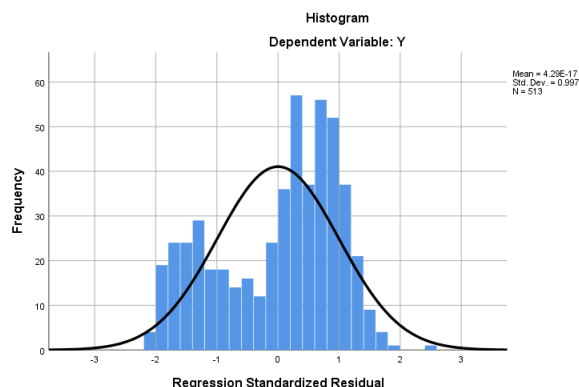
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	513	1	4	3.89	.371
X2	513	1	5	4.43	1.194
X3	513	.0001033	.7584302	.0322869	.0574941
Y	513	.00	14.00	6.8752	3.74355
Valid N (listwise)	513				

Uji Asusmsi Klasi

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji distribusi data yang akan dianalisis (Bahri, 2018:162). Dalam uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik dan grafik. Untuk uji statistik digunakan uji *one-sample-kolmogorov-smirnov* dengan pengambilan keputusan jika nilai sig > 0,05 maka data dikatakan terdistribusi normal. Untuk uji menggunakan analisis grafik digunakan berupa grafik histogram dan grafik P-Plot. Pada penelitian ini peneliti akan menunjukkan salah satu dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan grafik menggunakan histogram:

Tabel 3. Uji Normalitas dengan P-Plot



Pada tabel 3 Hasil menunjukkan garis membentuk lonceng terbalik dan data rapat memenuhi dan mengikuti garis lonceng yang berarti data dapat diartikan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independent. Penelitian yang tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerace $> 0,10$. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	1.000	1.000
X2	.998	1.002
X3	.998	1.002

Berdasarkan table 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen menghasilkan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini multikolinearitas maupun kolerasi antara variabel independen tidak ada.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji gletser yang mengorelasikan variabel independent dengan residualnya. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05, apabila nilai sig $> 0,05$ maka data dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Berikut table hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2.334	.891		2.380	.018
X1	-.004	.226	-.001	-.016	.987
X2	.112	.070	.070	1.588	.113
X3	-.069	.061	-.050	-1.127	.260

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser, menunjukkan korelasi antara variabel kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan rasio pembiayaan utang dengan nilai *unstandardized* residual memiliki nilai signifikansi (sig. 2-tailed) $> 0,05$ yaitu Sig. (2-tailed)

kualitas laporan keuangan sebesar 0,987, lama jabatan sebesar 0,113 dan rasio pembiayaan utang sebesar 0,260. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized	Standardized			
		Coefficients	Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.778	1.891		-.411	.000
	X1	2.220	.436	.220	5.096	.000
	X2	-.005	.135	-.001	-0.34	.973
	X3	.225	.117	.083	1.920	.055

Berdasarkan tabel 6 pada kolom *unstandardized coefficients*, diperoleh model persamaan regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = -.778 + 2.220X_1 - 0.005X_2 + 0.225X_3 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji Simultan F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara simultan atau bersama-sama dengan hipotesis yang diajukan taraf sig. 0,05. Jika tingkat sig. < 0,05, maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel secara simultan, begitupun sebaliknya. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 7. Uji Simultan F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	9.988	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Berdasarkan tabel 7., dapat diketahui nilai signifikannya yaitu 0,000. Ini berarti nilai sig. 0,000 < 0,05, yangmana artinya bahwa kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah secara simultan.

Determinasi Koefisien (R²)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk melihat kemampuan dan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Determinasi Koefisien

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.236 ^a	.056	.050	3.65269

Berdasarkan tabel 7. nilai Adjusted R Square diketahui sebesar 0,050 ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan rasio pembiayaan utang sebesar 5%, sedangkan 95% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikan $< 0,05$, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen begitupun sebaliknya.

Tabel 9. Uji t

Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std.	Beta	t	Sig.
		Error				
1	(Constant)	-.778	1.891		-.411	.000
	X1	2.220	.436	.220	5.096	.000
	X2	-.005	.135	-.001	-0.34	.973
	X3	.225	.117	.083	1.920	.055

Berdasarkan hasil uji variabel kualitas laporan keuangan diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Berarti nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian berarti H1 diterima dan artinya secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Berdasarkan hasil uji variabel lama jabatan diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,973. Ini berarti nilai sig. $0,973 > 0,05$. Dengan demikian berarti H2 ditolak, dan artinya secara parsial lama jabatan tidak berpengaruh terhadap transparansi. Berdasarkan hasil uji variabel rasio pembiayaan utang diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,055. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig. $0,055 > 0,05$. Dengan demikian bahwa H3 ditolak, yang berarti secara parsial rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi.

PEMBAHASAN

Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website. Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelaporan keuangan daerah dengan baik. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini terbaik yang diterima oleh pemerintah daerah, dimana pemda telah menyajikan laporan keuangan secara wajar tidak terjadi salah saji. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan hasil yang baik dan dipercaya dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang semakin baik maka informasi yang diungkapkan di website juga semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi, ketika pemerintah mendapat opini audit terbaik dari BPK, ini akan mendorong pemerintah dalam melaksanakan transparansi. Hasil opini yang baik yang disampaikan melalui website dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah melalui opini audit laporan keuangan tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan teori signal, perolehan opini WTP dari BPK atas kinerja pemerintah daerah menjadi sebuah sinyal yang positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah dengan mempublikasikannya melalui situs web pemda masing-masing. Hal ini sejalan dengan penelitian Yudistira, Abdul Rohman (2022); Krah & Mertens, (2020) dan Adiputra et al., (2018) dengan hasil penelitian yang diperolehnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan melalui hasil opini audit memengaruhi dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Pengaruh lama jabatan terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_2 menyatakan bahwa lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Kepala pemerintah yang telah lama menjabat tidak menjamin akan melakukan transparansi laporan keuangan pemerintah ke website pemerintah bahkan dapat menurunkan tingkat transparansi. Kepala daerah dengan masa jabatan yang lama memiliki pemahaman informasi yang mendalam, sehingga dapat mengetahui celah didalamnya dan dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Baik kepala daerah yang baru menjabat atau telah lama menjabat jika telah merasa aman dan

dipercaya oleh publik berisiko mengabaikan prinsip transparansi laporan keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan teori agensi. Dengan demikian, lama jabatan kepala daerah tidak menjadi dasar pemerintah melaksanakan transparansi laporan keuangan kepada publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Valentina & Kiswanto (2020) dan Gabriel & Castillo, (2020) yang menyatakan bahwa lamanya masa jabatan kepala daerah tidak memengaruhi tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemda.

Pengaruh rasio pembiayaan utang daerah terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H_3 menyatakan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki rasio pembiayaan utang lebih besar seharusnya memiliki tuntutan dalam melaksanakan transparansi, namun pemerintah daerah dengan rasio pembiayaan utang yang tinggi akan cenderung membatasi akses pada website. Hal ini dikarenakan penggunaan dana pinjaman yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaan dapat menunjukkan bahwa kinerja pemda yang rendah. Faktor lain yaitu masih rendahnya sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi yang semakin berkembang dan sistem informasi yang masih rendah. Hal ini dapat menghambat dalam proses transparansi.

Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi dan teori sinyal. Pemerintah bertanggungjawab dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana pinjaman dari kreditur. Pemerintah memiliki informasi yang mendalam daripada kreditur dan masyarakat. Namun dengan tidak mempublikasikan laporan keuangan, kreditur dan masyarakat tidak dapat mengetahui dan mengawasi bagaimana penggunaan dana pinjaman tersebut dan mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajibannya tersebut. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pranstawi & Kiswanto, (2020); Nosihana & Yaya, (2016) dan Wilopo, (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang tidak mempengaruhi adanya transparansi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Sedangkan variabel lama jabatan dan rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan nilai adjusted R Square dalam penelitian ini sebesar, 5% sedangkan sisanya 95% berada pada variabel lain diluar penelitian ini. Sehingga

peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel independen lainnya seperti belanja modal pemerintah, kekuatan politik, ukuran pemerintah daerah, dana alokasi daerah, dan tekanan eksternal untuk memperkuat hasil penelitian. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan transparansi pemerintah daerah di website agar masyarakat dapat mengetahui segala informasi dan mengawasi pemerintah daerah. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa website pemerintah kabupaten/kota yang tidak dapat diakses dalam rentan waktu 2 minggu penelitian

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Adolpino Nainggolan, & Rizki Amalia. (2019). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Kap Di Wilayah Jakarta Barat). *Jurnal Liabilitas*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i2.52>
- Afriani, B. R., & Satyawan, M. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(2), 195–204. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/195>
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327–347. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Fadilah, S. N., & Venusita, L. (2024). CEO Power dalam Kaitannya dengan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 226–236. <https://doi.org/10.26740/akunesa>
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 659–668.
- Fawziah, I. N., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2200–2213. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207>
- Gabriel, A. G., & Castillo, L. C. (2020). Transparency and Accountability Practices of Local Government Units in the Philippines: a Measurement from the Ground. *Public Organization Review*, 20(3), 437–457. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00450-8>
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 36(5),

679–695. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506980>

- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrua! Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(2), 1–19.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). *Financial statements disclosure on Indonesian local government websites A quest of its determinant (s)*. 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 95.
- Novalia, S., & Deviani, D. (2023). Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 127–140. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.636>
- Novananda, R., Hasibuan, F., & Muid, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi Di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurhadianto, T., & Sugiri, S. (2022). *Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia*. 50–70.
- Pradita, K. D. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.
- Pranaswati, H. V., & Kiswanto. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273–289. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862>
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 0–27. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>

- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78)
- Yuliani, N. L. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 24(1), 1–14.
- Yustikasari. (2018). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah da.pdf. *Jurnal Riset Akutansi Terpadu*, 11(1), 28–44.